



BAB II

***IHDAD* DALAM HUKUM ISLAM BUDAYA DAN SOSIOLOGI KELUARGA**

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya telah ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Diantaranya adalah yang dilakukan oleh Lia Fauziana mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darus Salam Banda Aceh, 2010, dengan judul, ***Ihdad* Wanita Karier (Studi Analisis Madzhab Hanafi)**. Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan bahwa menurut madzhab hanafi, selama masa *ihdad* wanita karier dibolehkan keluar rumah dalam keadaan darurat, karena wanita tersebut bekerja untuk mencari nafkah kepada anak dan keluarganya, tetapi wanita

itu tidak boleh memakai wangi-wangian dan perhiasan yang bisa meraik perhatian lawan jenisnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Heni mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010, dengan judul **“Dilema Praktek *Ihdad* (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)**. Dalam skripsi ini efektifitas *ihdad* belum memberikan hasil yang maksimal, hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti kebutuhan ekonomi yang tinggi yang menyebabkan para janda harus bekerja diluar rumah untuk menghidupi diri dan keluarganya, juga karena kurangnya pemahaman hukum Islam, dalam hal ini akan wajibnya pelaksanaan *ihdad* bagi para istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Selain itu juga, bahwa praktek *ihdad* yang biasa dilaksanakan warga Kebayoran Lama hanya berlangsung selama $\pm$ 3 bulan-an.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yalis Shohib Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, dengan judul ***Ihdad* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)**. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa teks dalam KHI pasal 170 sesungguhnya tidak bias gender, karena dalam KHI pasal 170 juga dicantumkan masa berkabung tidak hanya bagi perempuan melainkan juga bagi laki-laki. Jadi, dalam teks ini, laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama di mata hukum. *Ihdad* termasuk dalam kategori *'urf 'amaly*, karena dalam ber-*ihdad* berhubungan dengan kebiasaan masyarakat dengan perbuatan saat ditinggal mati pasangannya, namun

secara tersirat *ihdad* termasuk dalam jenis '*urf qawly*', karena dengan kebiasaan seseorang yang menjaga ucapannya dianggap tidak mampu menjaga dirinya dari fitnah. Penulis juga menyimpulkan bahwa *ihdad* termasuk '*urf*' khusus yakni bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya. Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan '*urf*' dalam menentukan hukum *ihdad* bagi masyarakat yang berkesesuaian dengan teori limitasi Shahrur, dimana seseorang yang melakukan *ihdad*, meskipun tidak sampai batas paling atas ia tetap dianggap telah melakukan *ihdad* dengan alasan akan muncul mudharat yang lebih besar, karena sebagaimana peraturan dalam KHI bahwa *ihdad* adalah dalam rangka menghindari fitnah yaitu timbulkan *khitbah* sebelum masa berkabung habis.

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama mengulas tentang *ihdad*, akan tetapi dari ketiga hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Penelitian pertama mengkaji tentang *ihdad* hanya dalam perspektif Madzhab Hanafi, yang mana fokus penelitiannya hanya kepada perempuan-perempuan yang sedang menjalani *iddah* atas kematian suaminya, dimana perempuan tersebut mempunyai tanggungan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan didalam rumah. Dalam penelitian kedua yang merupakan penelitian sosiologis yaitu peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat, disini penulis menjelaskan tentang hukum dan efektifitas pelaksanaan *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, khususnya pada masyarakat Kebayoran Lama, yang mana di daerah tersebut

pemahaman akan hukum Islam terbilang kurang. Sedangkan dalam penelitian ketiga penulis menjelaskan *ihdad* bagi perempuan yang terdapat Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170, namun hanya difokuskan pada *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Dari ketiga penelitian di atas, juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang ada dalam penelitian ini. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, tidak ada satupun yang mengkaji dan menjelaskan tentang *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya sesuai dengan informasi yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 (2) dan bagaimana pandangan para tokoh masyarakat terkait konsep kepatutan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 (2)

B. Konsep *Ihdad* dalam Perspektif Normatif

1. Pengertian *Ihdad*

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqh, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *iddah*”. Pembicaraan disini menyangkut untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.¹

¹Amir, *Hukum*, h. 320.

Mengenai untuk siapa dia melakukan *ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.²

Tentang kenapa dia harus berkabung, menjadi bahasan dikalangan ulama. Hal yang disepakati adalah bahwa *ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

2. Dasar Hukum *Ihdad*

Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal adalah:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ تُجَدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه البخاري ومسلم)³

“Dari Ummu Habibah r.a. katanya: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak diperbolehkan berkabung atas seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari. (HR. al- Bukhari dan Muslim)”

³Ahmad Sunarto, *Terj Hadis Shahih Muslim*, (Bandung: Husaini, 2002), h. 877.

3. Tujuan *Ihdad*

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa “*Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah. Begitu juga “ Suami yang tinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”*”

- b. Selain itu yang menjadi pertimbangan ialah bahwa untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
- c. *Ihdad* untuk menampakan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa el-Rasyidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.⁵
- d. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *ihdad* adalah selama empat bulan sepuluh hari si calon bayi yang tengah berada dalam perut ibu

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 319

⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 372.

akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh adalah setelah seratus duapuluh hari berlalu. Sepuluh hari disebut bentuk *mu'anats* yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.⁶

C. Budaya dan Sosiologi Keluarga

1. Kebudayaan

Terdapat beberapa definisi dari para ahli atas kebudayaan. Merujuk pada asal kata yang dipakai di Indonesia, kebudayaan berasal dari kata *buddaya* yang berarti akal, maka tentunya budaya hanya dicapai dengan kemampuan akal yang tinggi tingkatannya yang dalam hal ini dimiliki oleh manusia. Sementara dari hasil kata Yunani, *culture* berasal dari kata *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan.⁷

Macdonald mendefinisikan kebudayaan sebagai nilai, keyakinan, perilaku dan materi (*material objects*) yang mengatur kehidupan masyarakat. Adapun komponen kebudayaan adalah simbol, bahasa, nilai dan keyakinan. Simbol bisa berupa benda atau gerakan yang mempunyai arti khusus bagi orang yang terdapat dalam kelompok, komunitas atau masyarakat. Simbol itu disosialisasikan dan diwariskan melalui strategi tertentu, dan menjadi referensi ketika orang bersikap dan berperilaku. Bahasa adalah sistem simbol yang memungkinkan anggota masyarakat berkomunikasi satu sama lain. Bahasa bisa berupa

⁶Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. XXIV, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 421.

⁷Eko A. Meinarno, Bambang Widiyanto dan Rizka Halida, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat Pandangan Antropologi dan Sosiologi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 90.

lisan maupun tulisan. Kemudian nilai terkait dengan persoalan apa yang layak dilakukan dan harus dihindari bagi orang yang terhimpun dalam kelompok, komunitas atau masyarakat tertentu. Sedangkan keyakinan adalah pernyataan khusus yang diyakini orang terkait sesuatu yang paling besar. Sebagian dari simbol, bahasa, nilai dan keyakinan tersebut bisa berubah bersamaan dengan perkembangan masyarakat.⁸

Spillman menjelaskan sedikitnya ada tiga macam fungsi dan peran kebudayaan dalam kehidupan sosial. *Pertama*, kebudayaan sebagai ciri kelompok, komunitas atau masyarakat (*a feature of entire groups and societies*). Kebudayaan diasumsikan mempunyai kekuatan yang menghubungkan orang dengan kelompok, komunitas atau masyarakat lain. Di dalam kebudayaan diasumsikan terdapat ide-ide yang amat kompleks yang dipergunakan oleh anggota masyarakat sebagai pedoman atau acuan tentang apa yang seharusnya diketahui, apa yang dilarang dan diperbolehkan dilakukan, sebagaimana sesuatu seharusnya diperlakukan, dan hal apa saja yang seharusnya disosialisasikan kepada orang lain.⁹

Kedua, kebudayaan sebagai ekspresi kehidupan sosial (*a separate realm of human expression*). Dalam konteks ini, kebudayaan bisa berupa kesenian yang didalamnya terdapat karya kreatif yang

⁸Suntoyo Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 89-90.

⁹Suntoyo, *Sosiologi*, h. 90

indah karya seniman dalam bentuk lukisan, ukiran, tari, gubahan lagu dan sebagainya.¹⁰

Ketiga, kebudayaan berfungsi sebagai sarana pemaknaan (*as meaning-making*). Dalam konteks ini, kebudayaan tidak ditempatkan semata-mata sebagai ciri atau identitas kelompok, komunitas dan masyarakat. Kebudayaan juga tidak semata-mata dianggap sebagai karya kreatif manusia yang dikemas dalam bentuk karya seni atau serangkaian institusi sosial yang dibangun untuk memberi respons kondisi sosial tertentu. Akan tetapi lebih dikaitkan dengan proses pemaknaan (*processes of meaning-making*) di berbagai level lokasi sosial dan kepentingan. Fokus perhatiannya adalah pada pemahaman tentang perbedaan makna, serta efek makna tersebut bagi kehidupan sosial.¹¹

2. Keluarga dan Kekerabatan

Kelompok terkecil dalam masyarakat yang disebut sebagai keluarga batih adalah satu keluarga dengan orang tua, anak atau terdiri atas ayah, ibu, anak atau anak-anak yang belum menikah.¹²

Fungsi utama keluarga batih adalah memberi perlindungan, afeksi, pengasuhan dan pendidikan pada anggotanya. Keluarga batih tidak dapat disamakan dengan rumah tangga, walau bisa jadi sebuah

¹⁰Suntoyo, *Sosiologi*, h. 91.

¹¹Suntoyo, *Sosiologi*, h. 92.

¹²Eko, *Manusia*, h. 151.

keluarga batih juga merupakan rumah tangga. Keluarga juga memiliki fungsi untuk tetap mempertahankan keadaan diri dan mengakomodir tuntutan masyarakatnya. Fungsi tersebut, antara lain untuk mempertahankan nilai, menegakkan norma, dan menjadi bagian dari proses enkulturasi yaitu proses kemasyarakatan yang bersifat lintas generasi dan memungkinkan manusia untuk menyampaikan dan belajar tentang kebudayaan.

Dari proses pembelajaran atas nilai, seorang individu dapat mengkategorikan nilai baik dan buruk, benar atau salah yang patut dijunjung tinggi atau yang dicampakkan yang mendapat sanjungan dan yang mendapat hinaan dan cacian. Dalam hal ini, nilai (*values*) disebut sebagai himpunan gagasan mengenai apa yang benar atau salah, baik atau buruk dan yang diharapkan dan tidak diharapkan dalam suatu kebudayaan tertentu.¹³

Karena setiap kebudayaan memiliki kategori nilai yang dianut anggota keluarga tersebut, maka agar nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupannya, diperlukan alat operasional yang mengatur agar nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman bagi seluruh anggota keluarga yang ada di dalam satu masyarakatnya. Alat yang mengatur itu adalah norma-norma (*norms*) terbentuk dari aturan-aturan yang telah ada dari perilaku atau tindakan yang telah dibakukan.¹⁴

¹³Eko, *Manusia*, h. 153.

¹⁴Eko, *Manusia*, h. 153

a. Mozaik nilai

Nilai sebagai tema-tema abstrak yang nominal dapat dipilih ke dalam dua cara, yaitu pertama klasifikasi nilai merupakan pembagian nilai yang didasarkan pada sifat-sifat nilai itu sendiri dalam tatanan hierarkinya. Kedua, kategori nilai, yaitu pembagian nilai yang didasarkan pada bidang kehidupan manusia seperti pengetahuan, ekonomi, politik, budaya dan agama atau menurut pembagiannya.¹⁵

1) Klasifikasi nilai

a) Nilai terminal dan instrumental

Nilai-nilai pada diri manusia dapat ditunjukkan oleh cara tingkah laku atau hasil tingkah laku. Rescher membedakan nilai perilaku dalam konteks nilai antara dan nilai akhir. Sebuah taksonomi nilai yang cukup rinci dalam membedakan dua jenis nilai tersebut telah digagas pula oleh Rokeach.

Namun Rokeach menggunakan istilah nilai instrumental dan nilai terminal. Secara kronologis kejadian nilai pada diri individu, mengikuti urutan nilai seperti yang dikemukakan oleh Rokeach. Nilai-nilai instrumental lebih sering muncul dalam perilaku secara eksternal. Pada lapisan luar sistem perilaku dan nilai, sedangkan untuk nilai terminal lebih bersifat inheren, tersembunyi dibelakang nilai-nilai instrumental yang diwujudkan dalam perilaku. Sisi lain

¹⁵Rahmat Mulyono, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 25-35.

yang membedakan keduanya adalah nilai instrumental lebih beragam bentuk dan lebih spesifik, sedangkan nilai terminal berada pada bentuk tunggal yang bermakna umum dalam konteks cakupan nilai-nilai instrumental.

b) Nilai intrinsik dan ekstrinsik

Sesuatu dikatakan memiliki nilai intrinsik jika hal tersebut dinilai untuk kebaikanannya sendiri. Bukan untuk kebaikan hal lain, sedangkan sesuatu memiliki nilai ekstrinsik apabila hal tersebut menjadi perantara untuk mencapai hal lain.

Titus (1979) mengemukakan bahwa nilai intrinsik merupakan nilai yang lebih baik daripada ekstrinsik. Karena dalam perjalanannya kehidupan jangka panjang manusia. Nilai intrinsik bersumber dari nilai sosial, intelek, estetika dan agama cenderung memberikan kepuasan yang lebih permanen dari pada nilai-nilai ekstrinsik yang kerap lain dalam tampilan nilai material.

c) Nilai personal dan nilai sosial

Nilai-nilai yang bersifat personal terjadi dan terkait secara pribadi atas dasar dorongan-dorongan yang lahir secara psikologis dalam diri seseorang. Sedangkan nilai-nilai yang bersifat sosial lahir karena adanya kontak secara psikologis maupun sosial dengan dunia luar yang dipersepsi atau disikapi.

Kategori pengklasifikasi nilai berdasarkan personal dan sosial terjadi sebagai konsekuensi dari kecenderungan umum bahwa seseorang

berpegang pada nilai tertentu dikarenakan dia melihat adanya manfaat dari realisasi nilai tersebut bagi orang lain. Sehingga mengarah pada klasifikasi nilai yaitu nilai yang berorientasi pada diri dan nilai yang berorientasi pada orang lain.

d) Nilai subyektif dan obyektif

Subyektifitas mencerminkan tingkat kedekatan subyek (si penimbang nilai) dengan nilai yang diputuskan darinya. Sikap sentimentil, emosi, suka atau tidak suka memainkan peranan dalam menimbang dan memutuskan nilai. Harold (1979) mengemukakan bahwa nilai berada pada sisi dalam, tetapi hal itu ditampakkan oleh hal-hal yang menyangkut pemenuhan keinginan seseorang. Dengan demikian nilai subyektif menekankan fakta bahwa nilai yang diperoleh melalui pertimbangan kebaikan dan keindahan yakni memiliki bentuk yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pilihan individu, kelompok dan usia.

Berbeda dari nilai subyektif, nilai obyektif mencerminkan tingkat kedekatan nilai dengan obyek yang disifatnya. Titus menyatakan bahwa nilai secara tegas ada disana, di sekitar kita untuk kita temukan.

Dari pernyataan ini fakta nilai yakni kualitas yang dimiliki oleh benda atau hal mendahului pertimbangan nilai seseorang. Meski seseorang tertarik pada suatu benda atau hal, ia sebenarnya tidak mengkreasikan nilai.

2) Kategorisasi nilai

a) Nilai teoritik

Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoritik memiliki kadar benar-salah menurut timbangan akal pikiran. Karena itu, nilai ini erat dengan konsep, aksioma, dalil, prinsip, teori dan generalisasi yang diperoleh dari sejumlah pengamatan dan pembuktian ilmiah.

b) Nilai ekonomis

Nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untuk rugi. Obyek yang ditimbangnya adalah “harga” dari suatu barang atau jasa. Karena itu, nilai ini lebih mengutamakan kegunaan sesuatu bagi kehidupan manusia. Secara praktis nilai ekonomis dapat ditemukan dalam pertimbangan nilai produksi, pemasaran dan pertimbangan kemakmuran hidup secara umum.

c) Nilai estetika

Nilai estetika menempatkan nilai tertinggi pada bentuk dan keharmonisan. Nilai estetika lebih mencerminkan pada keragaman, sementara nilai teoritik mencerminkan pada identitas pengalaman. Dalam arti kata, nilai estetika lebih mengandalkan pada hasil penilaian pribadi seseorang yang bersifat subyektif.

d) Nilai sosial

Nilai tertinggi yang terdapat pada nilai ini adalah kasih sayang antar manusia. Karena itu, kadar nilai ini bergerak pada rentang antar kehidupan yang individualistik dan altruistik. Sikap tidak berpraduga

jelek terhadap orang lain, sosibilitas, keramahan, dan perasana simpati dan empati merupakan perilaku yang menjadi kunci keberhasilan dalam meraih nilai sosial. Nilai sosial banyak dijadikan pegangan hidup bagi orang yang senang bergaul, suka berderma, dan cinta sesama manusia atau yang di kenal dengan sosol filantropik.

e) Nilai politik

Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Karena itu, kadar nilainya akan bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pada pengaruh yang tertinggi. Kekuatan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap pemikiran nilai politik pada diri seseorang. Sebaliknya kelemahan adalah bukti dari seseorang yang kurang tertarik pada nilai ini. Ketika persaingan dan perjuangan menjadi isu yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia, para filosof melihat bahwa kekuatan menjadi dorongan utama dan berlaku universal pada diri manusia.

f) Nilai agama

Secara hakiki sebenarnya nilai ini meruakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnay dari Tuhan. Cakupan nilainyaupun cukup luas. Struktur nilai manusia dan kebenaran mistik-transendental merupakan dua sisi unggul yang dimiliki nilai agama. Karena itu, nilai tertinggi yang harus dicapai adalah kesatuan. Kesatuan berarti adanya keselarasan

semua unsur kehidupan antara kehendak manusia dan perintah Tuhan, antara ucapan dan tindakan, atau antar *i'tiqad* dengan perbuatan.

b. Nilai-nilai sosial

Dalam suatu kebudayaan terkandung nilai-nilai dan norma-norma sosial yang merupakan faktor pendorong bagi manusia untuk bertingkah laku dan mencapai kepuasan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan norma senantiasa berkaitan satu sama lain, walaupun keduanya dapat dibedakan. Nilai sebagai ukuran sikap dan perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan keadaan baik buruk, benar salah atau suka tidak suka terhadap suatu objek, baik material maupun non-material.¹⁶

Dalam buku pengantar sosiologi karangan D.A. Wila Huky (1982), disebutkan ada sebelas ciri-ciri nilai-nilai sosial yaitu:¹⁷

- 1) Nilai merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi diantara para anggota masyarakat. Nilai tercipta secara sosial bukan secara biologis atau bawaan sejak lahir.
- 2) Nilai sosial ditularkan. Nilai yang menyusun sistem nilai diteruskan dan ditularkan di antara anggota-anggota. Nilai ini dapat diteruskan dan ditularkan dari satu grup ke grup yang lain dalam suatu masyarakat melalui berbagai macam proses sosial,

¹⁶Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 49.

¹⁷Abdulsyani, *Sosiologi*, h. 50-51.

dan dari satu masyarakat serta kebudayaan ke yang lainnya melalui akulturasi, defusi dan sebagainya.

- 3) Nilai dipelajari. Nilai dicapai dan bukan bawaan lahir. Proses belajar dan pencapaian nilai-nilai itu, dimulai sejak masa kanak-kanak dalam keluarga melalui sosialisasi.
- 4) Nilai memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nilai yang disetujui dan yang telah diterima secara sosial itu menjadi dasar bagi tindakan dan tingkah laku, baik secara pribadi atau grup dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai juga membantu masyarakat agar dapat berfungsi dengan baik. Tanpa suatu sistem nilai masyarakat akan menjadi kacau. Oleh karena itu, sistem nilai sosial dipandang penting oleh masyarakat, khususnya untuk pemeliharaan kemakmuran dan kepuasan sosial bersama.
- 5) Nilai merupakan asumsi-asumsi abstrak dimana terdapat konsensus sosial tentang harga relatif dari objek dalam masyarakat. Nilai-nilai secara konseptual merupakan abstraksi dan unsur-unsur nilai dan bermacam-macam objek di dalam masyarakat.
- 6) Nilai cenderung berkaitan satu dengan yang lain secara komunal untuk membentuk pola-pola dan sistem nilai dalam masyarakat. Bila tidak terdapat keharmonisan yang integral dari nilai-nilai sosial, maka akan timbul problem sosial.

- 7) Sistem-sistem nilai bervariasi antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lain, sesuai dengan harga relatif yang diperlihatkan oleh setiap kebudayaan terhadap pola-pola aktivitas dan tujuan serta sasarannya. Dengan kata lain, keanekaragaman kebudayaan dengan bentuk dan fungsi yang saling berbeda, menghasilkan sistem-sistem nilai yang saling berbeda..
- 8) Nilai selalu menggambarkan alternatif dan sistem-sistem nilai yang terdiri dari struktur rangking alternatif-alternatif itu sendiri, sehingga saling menyempurnakan dan mengisi, dalam menentukan rangking dari posisi atau level dari obyek-obyek yang ada.
- 9) Masing-masing nilai dapat mempunyai efek yang berbeda terhadap orang perorangan dan masyarakat sebagai keseluruhan.
- 10) Nilai-nilai juga melibatkan emosi.
- 11) Nilai-nilai dapat mempengaruhi pengembangan pribadi dalam masyarakat secara positif maupun secara negatif.

c. Norma-norma sosial

Nilai dan norma tidak dapat dipisahkan. Nilai dan norma selalu berkaitan. Bedanya, secara umum norma mengandung sanksi yang relatif tegas terhadap pelanggarnya. Norma lebih banyak eksistensinya pada peraturan-peraturan yang selalu disertai oleh sanksi-sanksi yang merupakan faktor pendorong bagi individu ataupun kelompok

masyarakat untuk mencapai ukuran nilai-nilai sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan.¹⁸

Untuk dapat membedakan kekuatan norma-norma tersebut, maka secara sosiologis dikenal ada empat bagian norma-norma sosial dilihat dari sanksinya, yaitu:¹⁹

1) Cara berbuat (*usage*)

Norma yang disebut cara hanya mempunyai kekuatan yang dapat dikatakan sangat lemah dibanding norma yang lainnya. Cara lebih banyak terjadi pada hubungan-hubungan antar individu dengan individu maupun individu dengan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi pelanggaran terhadapnya (norma), seseorang hanya mendapatkan sanksi-sanksi yang ringan, seperti cemoohan atau celaan dari individu lain yang dihubungkannya.

2) Kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*folkways*)

Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding pengikat yang lebih kuat dibanding cara. Kebiasaan merupakan suatu indikator kalau orang-orang lain setuju atau menyukai perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang.

3) Tata kelakuan (*behavior*)

Tata kelakuan adalah suatu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap berperilaku. Tata

¹⁸Abdulsyani, *Sosiologi*, h. 54.

¹⁹Abdulsyani, *Sosiologi*, h. 55-56.

kelakuan lebih menunjukkan fungsi sebagai pengawas kelakuan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan mempunyai kekuatan pemaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; jika terjadi pelanggaran, maka dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi berupa pemaksaan terhadap pelanggarnya untuk kembali menyesuaikan diri dengan tata kelakuan umum sebagaimana telah digariskan.

4) Adat istiadat (*culture*)

Adat istiadat adalah tatakelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan mendapatkan sanksi hukum, baik formal maupun informal. Sanksi hukum formal biasanya melibatkan alat negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dalam memaksa pelanggarnya untuk menerima sanksi hukum. Sedangkan sanksi hukum informal biasanya diterapkan dengan kurang atau bahkan tidak rasional, yaitu lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat.²⁰

Pembagian norma sosial dilihat dari sumbernya:

1) Norma agama

Norma agama berasal dari Tuhan, pelanggarannya disebut dosa. Norma agama adalah peraturan social yang sifatnya mutlak sebagaimana penafsirannya yang tidak dapat ditawar-tawar atau

²⁰Abdulsyani, *Sosiologi*, h. 56.

diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Contoh: melakukan sembahyang kepada Tuhan, tidak berbohong, tidak boleh mencuri dan sebagainya.

2) Norma kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang bersifat akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap buruk. Pelanggaran terhadap norma ini berakibat sanksi pengucilan secara fisik (dipenjara, diusir) ataupun bathin (dijauhi). Contoh: orang yang berhubungan intim di tempat umum akan dicap tidak susila, melecehkan wanita atau laki-laki di depan orang.

3) Norma kesopanan

Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Contoh: tidak meludah di sembarang tempat, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, tidak kencing disembarang tempat.

4) Norma kebiasaan

Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang di buat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu. Pelanggaran terhadap norma ini berakibat celaan, kritik sampai pengucilan secara bathin. Contoh:

membawa oleh-oleh apabila pulang dari suatu tempat, bersalaman ketika berteman.

3. Sosiologi keluarga

a. Keluarga sebagai sistem sosial

Disemua masyarakat yang kita kenal, hampir semua orang hidup terikat dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut hubungan peran (role relations). Perilaku seseorang didasarkan akan adanya hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses dimana ia belajar mengetahui apa yang dikehendaki. Tetapi ada orang yang merasakan kewajiban itu sebagai suatu beban, atau tidak peduli akan hak-hak tersebut. Keanekaragaman tingkah laku inilah yang menjadi salah satu tema pembicaraan umum yang terdapat disemua masyarakat, yaitu mengenai apa yang menjadi kewajiban anak dan orang tua, suami dan istri, keponakan dan paman, dan juga apakah semua tugas dan tanggung jawab tersebut sudah dijalankan.²¹

Individu dalam masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu berada. Sosialisasi juga merupakan proses transmisi kebudayaan antar generasi, karena tanpa sosialisasi masyarakat

²¹Su'adah, *Sosiologi Keluarga*, (Malang: UMM Press, 2005), h. 31.

tidak dapat bertahan melebihi satu generasi. Syarat penting untuk berlangsungnya proses sosialisasi adalah interaksi sosial, karena tanpa interaksi sosial sosialisasi tidak mungkin berlangsung.²²

Menurut Vander Zande, sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui dimana individu atau kelompok mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku, sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat. Menurut David A. Goslin, sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan nilai-nilai dan norma-norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat.²³

b. Keluarga dan masyarakat

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah *a union of families*. Artinya kurang lebih masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga.²⁴

Awal dari masyarakatpun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi satu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat. Jadi keluarga dapat dikatakan inti dari masyarakat dimana setiap keluarga dapat menganggap dirinya adalah sentral dari seluruh masyarakat. Karena keluarga ini pada

²²Su'adah, *Sosiologi*, h. 34.

²³Su'adah, *Sosiologi*, h. 34-35.

²⁴Su'adah, *Sosiologi*, h. 110.

hakekatnya mempunyai hubungan yang menjurus ke segala arah dalam masyarakat yang disebut tetangga untuk yang terdekat, kampung, daerah, negara dan seterusnya dunia.

Keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi, tetapi merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Sebab itu, seseorang selalu berada di bawah pengawasan saudara-saudaranya, yang merasakan bebas untuk mengkritik, menyarankan, memerintah, membujuk, memuji atau mengancam, agar dapat melakukan kewajiban yang telah dibebankan.²⁵

Sebagai sentral dan sekaligus anggota masyarakat, keluarga mempunyai inter-relasi dengan masyarakat di luarnya. Setiap individu dalam suatu keluarga berusaha untuk membawa citra keluarga di dalam masyarakat. Hubungan antar keluarga yang baik berarti merupakan hubungan masyarakat yang baik pula. Dan keluarga sebagai suatu unit, setiap anggotanya dapat merupakan wakil dari keluarga tersebut dalam kehidupan sosial.²⁶

Dalam kehidupan sosial, tentu saja keluarga tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, baik norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku. Karena pada dasarnya norma dan nilai yang ada dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang akan dijalankan oleh keluarga. Dan jelas nilai dan norma yang berlaku adalah bersifat

²⁵William J. Goode, *The Family*, terj. Lailahanoum Hasyim, *Sosiologi Keluarga*, (Cet VII; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 4.

²⁶Su'adah, *Sosiologi*, h. 110.

kolektif dan mengikat, sehingga keluarga harus dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku tersebut.²⁷

Misalnya, dalam perkawinan. Sebuah keluarga yang hendak menyelenggarakan perkawinan, haruslah dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakatnya. Keluarga tidak dapat menentukan sendiri atau corak perkawinan yang diinginkannya. Jadi keluarga tetap harus mengikut sertakan masyarakat dalam upacara-upacara yang harus dilakukannya.

c. Jawa

1) Sistem kekerabatan Budaya Jawa

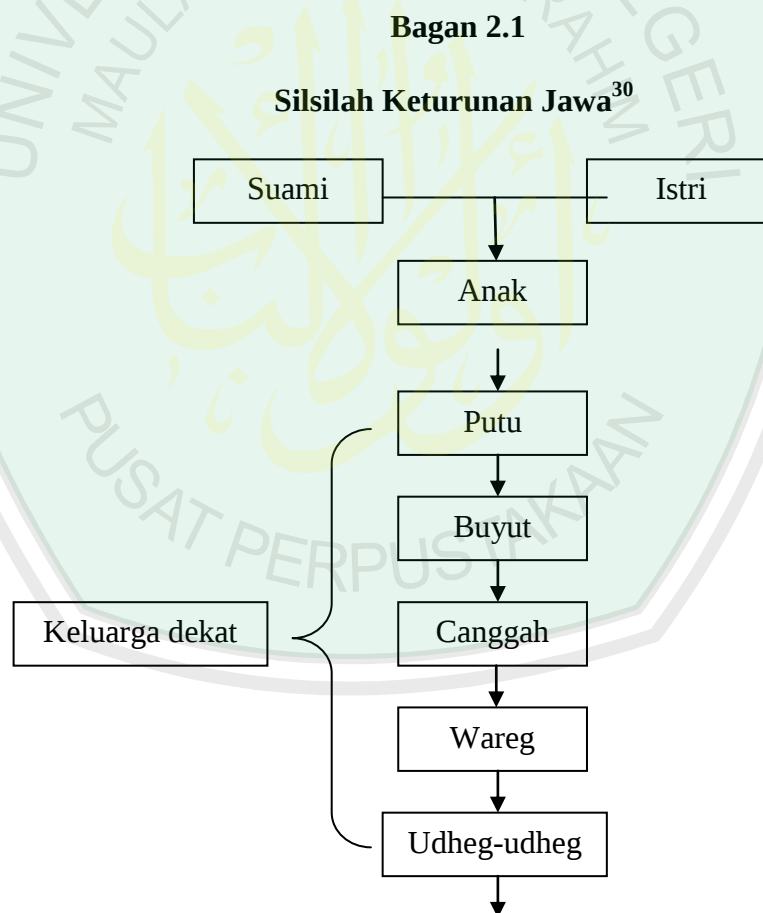
Menurut Kodiran dalam buku *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Sistem kekerabatan orang jawa itu berdasarkan prinsip keturunan *bilateral*.²⁸ Jadi, untuk menarik garis keturunan, bisa melalui pihak perempuan maupun laki-laki. Namun dalam perkembangannya orang jawa tidak selalu menyebut kekerabatan mereka dari dua jalur ayah dan ibu. Seperti yang dinyatakan Muchlis Emenve dalam blognya.²⁹ Suku Jawa menganut garis keturunan ayah atau disebut *Patrilineal/ Patriakhal*. Hal ini terlihat dari pemakaian nama belakang seseorang sering memakai nama ayah, anak laki-laki

²⁷Su'adah, *Sosiologi*, h. 111.

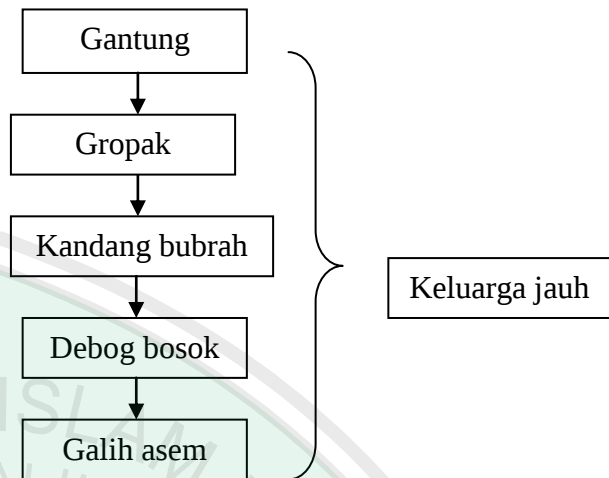
²⁸Kodiran, *Kebudayaan Jawa*, dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Cet XX; Jakarta: Djambatan, 2007), h. 337.

²⁹Emenve, Muchlis, "*Sistem kekerabatan Jawa (Genealogis)*", <http://lokajaya.blog.uns.ac.id/2011/02/14/sistem-kekerabatan-jawa-genealogis/>, di akses tanggal 23 april 2015.

juga menjadi kebanggaan keluarga dan mendapatkan perhatian khusus dibanding anak perempuan karena diyakini seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, dalam hal waris pun dikenal *anak lanang sa pikul anak wadon sak gendongan* (anak laki-laki lebih banyak bagiannya dalam pembagian warisan dari pada anak perempuan). Dikenal pula istilah *lajer* yaitu garis keturunan keluarga laki-laki saja.



³⁰Emenve, Muchlis, “*Sistem kekerabatan Jawa (Genealogis)*”, <http://lokajaya.blog.uns.ac.id/2011/02/14/sistem-kekerabatan-jawa-genealogis/>, di akses tanggal 23 april 2015



2) Masyarakat Jawa

Orang Jawa membedakan dua golongan sosial: (1) *wong cilik* (orang kecil), terdiri dari sebagian besar massa petani dan mereka yang berpendapatan rendah di kota, dan (2) kaum *priyayi* dimana termasuk kaum pegawai dan orang-orang intelektual. Di samping lapisan-lapisan sosial-ekonomis ini masih dibedakan dua kelompok atas dasar keagamaan. Kedua-duanya secara nominal termasuk agama Islam, tetapi golongan pertama dalam kesadaran dan cara hidupnya lebih ditentukan oleh tradisi-tradisi Jawa pra-Islam, sedangkan golongan kedua memahami diri sebagai orang Islam dan berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam. Yang pertama dapat dikatakan Jawa Kejawen. Dalam kepustakaan, kelompok pertama sering juga disebut “abangan”, yang kedua “santri”.³¹

³¹Fanz Magnis-Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Cet VIII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 12-13.

Kaum santri jelas berbeda dari kaum *priyayi* dan massa orang Jawa Kejawen sederhana karena mereka berusaha untuk mengatur hidup mereka menurut aturan-aturan agama Islam. Mereka berusaha untuk menjaga ortodoksi Islam walaupun praktek religius mereka dalam kenyataan masih bercampur dengan unsur-unsur kebudayaan Jawa lokal. Bentuk-bentuk keagamaan orang desa “abangan” dan kebudayaan kaum *priyayi* dipandang dengan curiga karena tidak sesuai dengan banyak aturan agama Islam. Adat istiadat kuno mau disesuaikan dengan hukum syari’at Islam.³²

3) Kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa

a) Prinsip kerukunan

Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Keadaan semacam itu disebut *rukun*. *Rukun* berarti “berada dalam keadaan selaras”, “tenang dan tentram”, “tanpa perselisihan dan pertentangan”. Berlaku *rukun* berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik.³³

Suatu konflik biasanya pecah apabila kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan bertabrakan. Sebagai cara bertindak kerukunan menuntut agar individu bersedia untuk

³²Franz, *Etika*, h. 14.

³³Franz, *Etika*, h. 39.

menomorduakan, bahkan kalau perlu, untuk melepaskan kepentingan-kepentingannya pribadi demi kesepakatan bersama.

Suatu teknik lain untuk menghindari kekecewaan adalah kebiasaan untuk berpura-pura. Orang Jawa bicara tentang *othok-ethok*. Kemampuan untuk ber-*ethok-ethok* adalah suatu seni yang tinggi dan dinilai positif. *Ethok-ethok* berarti bahwa diluar lingkungan keluarga inti orang tidak akan memperlihatkan perasaan-perasaannya yang sebenarnya. Itu terutama berlaku tentang perasaan-perasaan negatif. Walaupun seseorang diliputi kesedihan yang mendalam, ia diharapkan tersenyum. Apabila kita mendapat kunjungan orang yang kita benci, kita harus tetap kelihatan gembira, dan banyak orang Jawa menjadi juara dalam seni itu.³⁴

Inti prinsip kerukunan ialah tuntutan untuk mencegah segala kelakuan yang bisa menimbulkan konflik terbuka. Tujuan kelakuan rukun ialah keselarasan sosial, keadaan yang rukun. Suatu keadaan disebut rukun apabila semua pihak dalam kelompok berdamai satu sama lain. Motivasi untuk bertindak rukun bersifat ganda: di satu pihak individu berada di bawah tekanan berat dari pihak lingkungannya yang mengharapkan daripadanya sikap rukun dan memberi sanksi terhadap kelakuan yang tidak sesuai. Di lain pihak

³⁴Franz, *Etika*, h. 43.

individu membathinkan tuntutan kerukunan sehingga ia merasa bersalah dan malu apabila kelakuannya mengganggu kerukunan.³⁵

b) Prinsip hormat

Kaidah kedua yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa ialah prinsip hormat. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. “apabila dua orang bertemu, terutama dua orang Jawa, bahasa, pembawaan dan sikap mereka mesti mengungkapkan suatu pengakuan terhadap kedudukan masing-masing dalam suatu tatanan sosial yang tersusun dengan terperinci dan cita rasa. Mengikuti aturan-aturan tatakrama yang sesuai, dengan mengambil sikap hormat atau kebapaan yang tepat adalah amat penting.³⁶

Kefasihan dalam mempergunakan sikap-sikap hormat yang tepat dikembangkan pada orang Jawa sejak kecil melalui pendidikan dalam keluarga. Sebagaimana diuraikan oleh Hildred Geertz, pendidikan itu tercapai melalui 3 perasaan yang dipelajari oleh anak Jawa dalam situasi-situasi yang menuntut sikap hormat, yaitu *wedi*, *isin* dan *sungkan*.³⁷

Pertama-tama anak belajar untuk merasa *wedi* terhadap orang yang harus dihormati. Anak dipuji apabila bersikap *wedi* terhadap

³⁵Franz, *Etika*, h. 52.

³⁶Franz, *Etika*, h. 60.

³⁷Franz, *Etika*, h. 63.

orang yang lebih tua dan terhadap orang asing. Bentuk-bentuk pertama kelakuan halus dan sopan dididik pada anak dengan menyindir pada segala macam bahaya mengerikan dari pihak-pihak asing dan kekuatan-kekuatan di luar keluarga yang akan mengancamnya.³⁸ Tidak lama kemudian mulailah pendidikan untuk merasa *isin*.³⁹ *Isin* berarti malu, juga dalam arti malu-malu, merasa bersalah, dan sebagainya. Belajar untuk merasa malu (ngerti *isin*) adalah langkah pertama ke arah kepribadian Jawa yang matang. Sebaliknya penilaian ora ngerti *isin*, ia tidak tahu malu, merupakan suatu kritikan yang amat tajam.

Apabila anak sudah kurang lebih berumur 5 tahun maka, ia sudah mengerti konteks-konteks mana yang harus membuat dia merasa *isin*. Semakin ia menjadi dewasa dan semakin ia menguasai tatkrama kesopanan, semakin ia diakui sebagai anggota masyarakat Jawa penuh. Selama tahun-tahun ini orang Jawa belajar merasa *sungkan*. *Sungkan* itu suatu perasaan yang dekat dengan rasa *isin*. *Sungkan* adalah malu dalam arti yang lebih positif. Berbeda dengan rasa *isin*, perasaan *sungkan* bukanlah suatu rasa yang hendaknya dicegah. *Sungkan* sebagai rasa hormat yang sopan terhadap atasan atau sesama yang belum dikenal.⁴⁰

³⁸Hildred Geertz, *The Javanese Family*, terj. Grafiti Press, *Keluarga Jawa*, (Cet III; Jakarta: PT. Grafiti Press, 1985), h. 114

³⁹Hildred, *The Javanese*, h. 115-117.

⁴⁰Hildred, *The Javanese*, h. 114.

Masyarakat Jawa menuntut agar usahanya untuk menjamin kepentingan-kepentingan dan hak-haknnya sendiri jangan sampai mengganggu keselarasan sosial. Prinsip kerukunan secara prinsipiil melarang pengambilan posisi yang bisa menimbulkan konflik. Prinsip hormat melarang pengambilan posisi-posisi yang tidak sesuai dengan sikap-sikap hormat yang dituntut. Apapun yang diharapkan dan diusahakan oleh individu, betapapun hak-hak dan kepentingan-kepentingannya, bagaimanapun ia menilai suatu keadaan, masyarakat Jawa mengharapkan agar individu hanya bertindak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri, sejauh keselarasan tetap dijaga dan derajat-derajat hirarkis tetap dihormati. Prinsip-prinsip keselarasan dengan demikian memuat larangan mutlak terhadap usaha untuk bertindak hanya atas dasar kesadaran dan kehendak seseorang sendiri saja.⁴¹

d. Madura

1) Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura

Madura terkenal dengan kekhasan dan keunikan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan

⁴¹Franz, *Etika*, h. 71.

tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.⁴² Penggunaan istilah khas menunjuk pada pengertian bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lain.⁴³ Kekhususan kultural itu tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figur utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis keberagaman. Keempat figur itu adalah *Buppa'*, *Babbu*, *Guru*, dan *Rato* (ayah, ibu, guru, dan pemimpin pemerintahan).⁴⁴

Selain terkenal dengan budayanya yang khas, Madura juga terkenal dengan keunikan budaya yang dalam hal ini tampak pada perilaku dalam memelihara jalinan persaudaraan sejati. Hal ini tergambar dari ungkapan budaya *oreng dhaddhi taretan*, *taretan dhaddhi oreng* (orang lain dapat menjadi atau dianggap sebagai saudara sendiri, sedangkan saudara sendiri dapat menjadi atau dianggap sebagai orang lain).⁴⁵ Bagi masyarakat Madura, persaudaraan tidak selalu identik dengan hubungan darah kekerabatan, tetapi juga pada pertemanan. Persaudaraan yang mungkin masih satu rumpun keluarga, dapat saja berubah menjadi permusuhan disebabkan adanya persoalan yang tidak dapat

⁴²Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Cet. XX, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 25.

⁴³Mahrus Ali, "Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum*, 1 (Januari 2010), h. 88.

⁴⁴A. Latief Wiyata, *Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura*, (Jakarta: CERIC-FISIP UI, 2003), h. 1.

⁴⁵A. Latief, *Madura*, h. 61.

diselesaikan secara kekeluargaan. Relasi seperti itu, lalu secara kolektif biasa disebut dengan teman (*kanca*) dan musuh (*moso*). Teman merupakan relasi sosial dengan tingkat keakraban paling tinggi. Sebaliknya, musuh merupakan relasi sosial dengan tingkat keakraban paling rendah.⁴⁶

Masyarakat Madura juga dikenal dengan karakteristik yang menonjol, yaitu karakter apa adanya. Sifat masyarakat Madura ekspresif, spontan, dan terbuka. Ekspresivitas, spontanitas, dan keterbukaan orang Madura, senantiasa termanifestasikan ketika harus merespon segala sesuatu yang dihadapi, khususnya terhadap perlakuan orang lain atas dirinya. Dengan karakteristik yang demikian, sebenarnya nilai-nilai budaya Madura membuka peluang bagi ekspresi individual secara lebih transparan.⁴⁷

Bagi orang Madura harga diri merupakan nilai budaya yang hingga saat ini masih dijunjung tinggi. Harga diri adalah nilai yang mendasar bagi orang Madura dan menjadi ukuran eksistensi diri. Oleh karenanya, harga diri merupakan hal penting yang harus dipertahankan agar tidak direndahkan.⁴⁸

Demikian halnya dengan nilai kesopanan. Penghormatan orang Madura terhadap nilai-nilai kesopanan sangat tinggi. Begitu

⁴⁶ A. Latief, *Madura*, h. 60

⁴⁷ Mahrus, *akomodasi*, h. 89.

⁴⁸ Bambang Sambu Badriyanto, *Karakteristik Etnik dan Hubungan Antar Etnik*, Ringkasan Hasil Penelitian, Universitas Jember, tt, h. 8. Dalam jurnal Mahrus Ali, "Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum*, 1 (Januari 2010), h. 89

pentingnya nilai kesopanan sehingga terdapat banyak ungkapan yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya ungkapan *ta'tao batona langgar* (tidak pernah merasakan lantainya langgar) mencerminkan suatu ungkapan bahwa seseorang belum pernah masuk langgar dan mengaji atau belum pernah tinggal di pondok pesantren, sehingga tidak mengenal tatakrama atau kesopanan. Ungkapan ini ditujukan untuk orang-orang yang melanggar nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat Madura.⁴⁹

Masyarakat Madura tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam dan Madura seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berhubungan dengan erat satu sama lain. Perilaku orang Madura begitu kental dengan ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan nilai-nilai budaya masyarakat Madura.⁵⁰ Nilai-nilai Islam menjadi salah satu sifat yang mendefinisikan orang Madura, sehingga dengan demikian bahwa orang Madura pasti beragama Islam. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa orang Madura berjiwa agama Islam terdapat ungkapan *abantal syahadat, asapo iman, apayung Allah* (dalam kehidupan mereka memakai syahadat sebagai alas kepala, berselimut iman, dan berlindung kepada Allah, niscaya akan

⁴⁹Mahrus, akomodasi, h. 90.

⁵⁰Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), h. 347

selamat). Menghina agama sama halnya menyinggung harga diri (*apote tolang*), hukumnya adalah mati. Status seseorang bagi orang Madura dilihat dari kadar ke-Islaman yang melekat pada dirinya. Simbol agama Islam tertinggi yang dipakai sebagai patokan adalah kiai dan kemudian haji.⁵¹

2) Sistem kekerabatan Budaya Madura

Suku Madura dalam letak geografisnya masih termasuk kedalam pulau Jawa. Dengan demikian sistem kekerabatannya tidak akan jauh berbeda dengan sistem kekerabatan yang ada di suku Jawa. Suku Madura mengenal sistem kekerabatan yang di hitung melalui garis keturunan laki-laki maupun perempuan, yang disebut *bilateral*.⁵² Kekerabatan *bilateral*, menghubungkan seseorang dengan lain-lain saudara dekat melalui laki-laki dan perempuan, orang menelusuri keturunannya melalui kedua orang tuanya sekaligus dan mengakui adanya banyak leluhur.⁵³

Namun, dalam perkembangannya yang lebih mendominasi adalah pihak laki-laki, ayah. Ikatan kekerabatan orang Madura mencakup sampai empat generasi ke atas (*ascending generations*) dan ke bawah (*descending generations*).⁵⁴

⁵¹Bambang, *Karakteristik*, h. 7. Dalam jurnal Mahrus Ali, "Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum*, 1 (Januari 2010), h. 90.

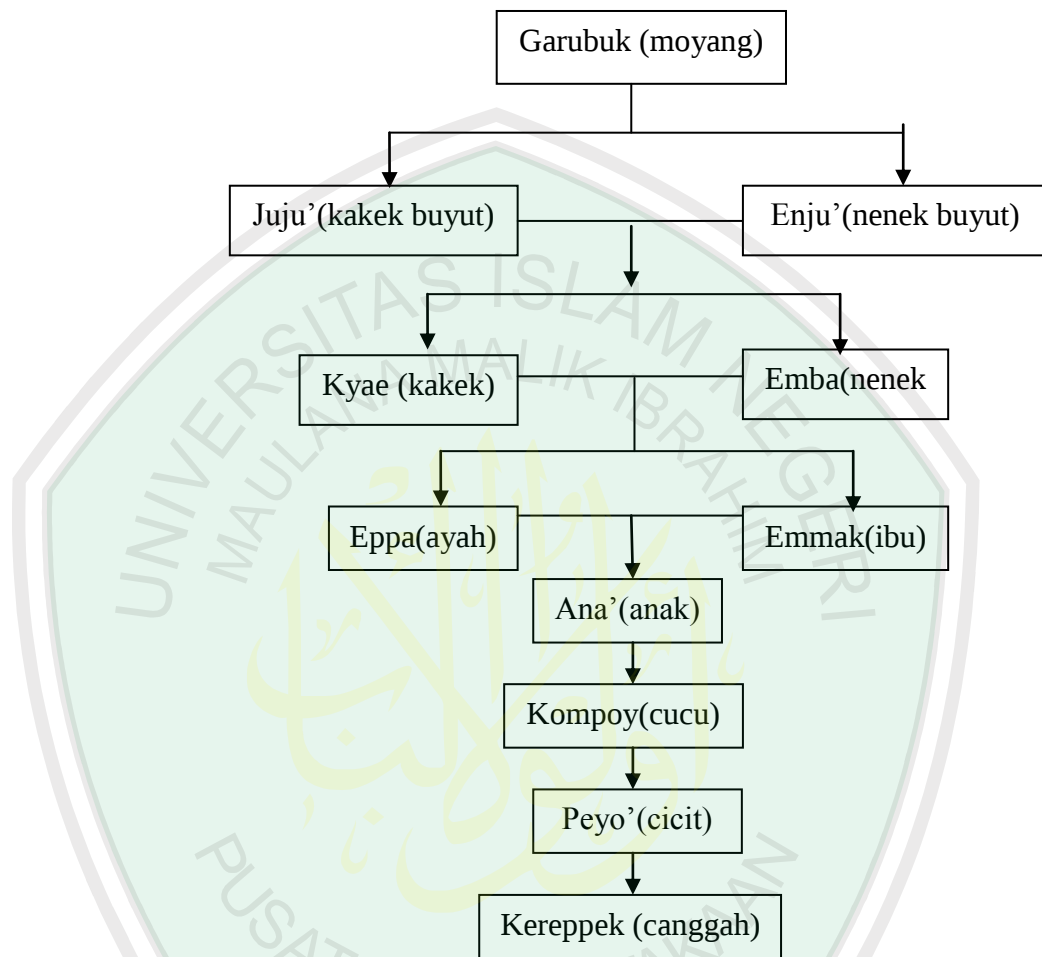
⁵²Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tata Krama Suku Bangsa Madura*. (Yogyakarta: *depdikbud*, 2002), h. 15.

⁵³Havilland, W. A. *Antropologi Jilid 2*. Terjemahan oleh R. G. Sukadijo. 1993. Jakarta: Erlangga, 1985), h. 118.

⁵⁴A. Latief Wiyata, *Carok: konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, (Yogyakarta: Lkis, 2002) h. 56-57.

Bagan 2.2

Silsilah Keluarga Madura



Dalam sistem kekerabatan masyarakat Madura dikenal tiga kategori sanak keluarga atau kerabat (*kinsmen*), yaitu:

- Taretan *Dalem* (kerabat inti atau *core kin*),
- Taretan *Semma'* (kerabat dekat atau *close kin*), dan
- Taretan *Jeu* (kerabat jauh atau *peripheral kin*).

Di luar ketiga kategori ini disebut sebagai *oreng lowar* (orang luar) atau "bukan saudara". Dalam kenyataannya, meskipun

seseorang sudah dianggap sebagai *oreng lowar* tetapi bisa jadi hubungan persaudaraannya lebih akrab daripada kerabat inti, misalnya karena adanya ikatan perkawinan.

